

SKRIPSI
EKOLOGI POLITIK
(STUDI TENTANG DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) BINUANG KAB. POLEWALI
MANDAR)



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
pada Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

Disusun Oleh:

TAUFIQ AKBAR HIDAYAT

E041181305

DEPARTEMEN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

EKOLOGI POLITIK (STUDI TENTANG DAMPAK KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)
BINUANG KAB. POLEWALI MANDAR)

Disusun dan Diajukan Oleh:

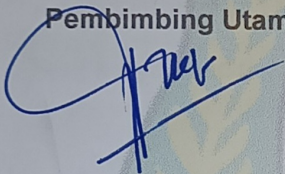
TAUFIQ AKBAR HIDAYAT

E041181305

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Sarjana Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal 10 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

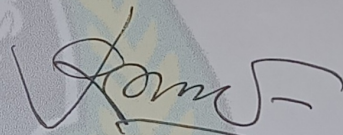
Pembimbing Utama



Dr. Gustiana Kambo, S.IP., M.Si

NIP. 19730813 199802 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si

NIP. 19680508 201901 5 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

NIP. 19621231 199003

HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI

EKOLOGI POLITIK
(STUDI TENTANG DAMPAK KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI
TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) BINUANG KAB. POLEWALI
MANDAR)

Disusun dan Diajukan Oleh:

TAUFIQ AKBAR HIDAYAT

E041181305

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

Pada Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin
Makassar, 12 Juli 2021

Menyetujui
Panitia Ujian

Ketua Dr. Gustiana Kambo, S.IP., M.Si

(.....)

Sekretaris Muhammad Imran, S.IP., M.Si

(.....)

Anggota Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D.

(.....)

Anggota Haryanto, S.Ip., M.A.

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Taufiq Akbar Hidayat

Nim : E041181305

Program Studi : Ilmu Politik

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

"Ekologi Politik (Studi Tendang Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Binuang Kab. Polewali Mandar) adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain. Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Makassar, 3 Agustus 2023

Yang menyatakan



Taufiq Akbar Hidayat

ABSTRAK

Taufiq Akbar Hidayat, NIM E041181305. Program Studi Ilmu Politik, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. **“Ekologi Politik (Studi Tentang Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Binuang Kab. Polewali Mandar).”** Dibawah bimbingan **Dr. Gustiana Kambo, S.IP., M.Si.** selaku pembimbing utama dan **Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si** selaku Pembimbing pendamping.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu aspek penting tata kelola wilayah yang baik. Pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan sampah sebelum dikembalikan ke lingkungan. Pengelolaan sampah di TPA Binuang mengantarkan Kab. Polewali Mandar untuk mendapatkan piala Adipura. Di sisi lain, pelaksanaan pengolahan sampah di TPA Binuang menyebabkan masalah lingkungan yakni merembesnya air lindi ke sawah masyarakat, menimbulkan bau yang tercium ke pemukiman penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang dan pengaruhnya terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat sekitar TPA, serta bagaimana tindak lanjut pengelolaan sampah di TPA Binuang

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekologi politik untuk mengetahui bagaimana fenomena perubahan lingkungan yang disebabkan pengelolaan sampah di TPA Binuang dan dampaknya pada aspek sosial, ekonomi dan politik masyarakat. Adapun konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep ekologi politik, teori kebijakan publik dan evaluasi dampak kebijakan publik.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masalah lingkungan yang timbul dari pengelolaan sampah disebabkan oleh tidak maksimalnya pengelolaan sampah yang dilakukan karena adanya masalah tumpang tindih peran antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab. Polewali Mandar penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang belum mencerminkan prinsip-prinsip ekologi politik yang berkelanjutan dan berkeadilan. Hal ini dapat diamati pada bagaimana posisi lingkungan dalam negosiasi kebijakan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat. Konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat itu hanya berfokus pada pemenuhan hak masing-masing tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan. Kondisi ini membuat pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tidak optimal, sehingga menimbulkan dampak yang mengorbankan hak-hak dan kesejahteraan masyarakat sekitar TPA Binuang.

Kata Kunci: Ekologi Politik, Dampak Kebijakan, Kebijakan, Pengelolaan Sampah

ABSTRACT

Taufiq Akbar Hidayat. E041181305, Political Science Study Program, Departemen of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences Hasanuddin University “**Political Ecology (Study on the Impact of Waste Management Policy in Binuang Landfill Kab. Polewali Mandar.)**” which was guided by **Dr. Gustiana Kambo, S.IP., M.Si.** and **Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si**

Waste management is one of the important aspects of good regional governance. The waste management at Binuang landfill aims to minimize the negative impact caused by the garbage before it is returned to the environment. Waste management at TPA Binuang made Polewali Mandar win the Adipura Cup. But on the other hand, the waste management process in Binuang landfill has caused environmental problems, the infiltration of leachate into the community ricefield, causing a scented smell to the settlements. This research aims to find out why the waste management in Binuang landfill caused the leakage of leachate from the landfill into the community ricefield and caused air pollution as well as how to follow up the waste management at Binuang landfill.

This research uses a political ecological approach to find out how the phenomena of environmental change caused by waste management in Binuang landfill and its impact on the social, economic and political aspects of society. As for the concepts and theories used in this research are the conceptions of political ecology, public policy theory and public policy impact assessment.

The research results show that the environmental problems arising from waste management are caused by the suboptimal waste management due to overlapping roles between the Provincial Government and the Polewali Mandar Regency Government. This research shows that the waste management policy at Binuang landfill does not reflect the principles of sustainable and equitable political ecology. This can be observed in how the environment is positioned in policy negotiations between the government and the community. The conflict between the government and the community only focuses on fulfilling each other's rights without considering environmental aspects. This condition makes waste management at the landfill not optimal, resulting in impacts that sacrifice the rights and welfare of the surrounding community of Binuang landfill.

Key Word: Political Ecology, Policy Impact, Waste Management

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *Rabbil'alam*, rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu wa ta'ala* atas segala rahmat, hidayah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini pada waktu yang tepat segai salah satu syarat penyelesaian studi meraih gelar sarjana program studi ilmu politik pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah *shallallahu'alaihi wa sallam*, sang revolusioner sejati yang membawa manusia menuju peradaban yang diselimuti oleh ilmu pengetahuan dan keimanan. Semoga hal-hal baik senantiasa menyertai kita semua.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, yang sangat penulis cintai dan sayangi, ibu Muhsanah dan bapak Muh. Nur Hidayat yang setiap nafasnya diiringi doa, dan di pundaknya terletak tanggung jawab, di dadanya berdetak perjuangan untuk anak-anaknya. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kedua orang tua karena telah melahirkan, membesarkan dan mendidik hingga saat ini. Kepada adik-adik penulis, Muh. Fikri Hidayat, Ahmad Fauzan Hidayat dan Nadia Aulia Hidayat yang terkadang menjengkelkan namun tetap penulis sayangi, serta seluruh keluarga besar yang memberikan doa, semangat, beban moral, dan motivasi

Penulis dengan kesadaran penuh memahami bahwa kebenaran yang ada dalam skripsi ini merupakan kebenaran subjektif bagi diri penulis. Maka dari itu, perbedaan pandangan mengenai kandungan skripsi ini merupakan hal yang alamiah, serta menjadi hal penting bagi penulis sebagai masukan dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bimbingan, kritik dan saran dari dosen pembimbing. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP., M.Si selaku pembimbing utama, dan Bapak Dr. Muhammad Imran, S.IP., M.Si selaku pembimbing pendamping karena telah membantu, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kontribusi bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan jajarannya yang memfasilitasi penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Drs. A. Yakub, M.Si., Ph.D. selaku Ketua Departemen Ilmu Politik dan jajarannya telah memfasilitasi penulis dan memberikan kemudahan

terhadap penulis dalam menempuh pendidikan di program studi ilmu politik..

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik.
5. Seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
6. Seluruh informan, Pemerintah Kab. Polewali Mandar, DLHK Kab. Polewali Mandar, Masyarakat Desa Paku. Kak Yolani, Adikku Nur Fazira dan Nabila yang menghubungkan saya dengan informan. Terima kasih telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
7. Kepada keluarga besar khususnya om saya Muhammad Ishaq A, sepupu saya Wahyu dan Ilham yang banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di Makassar.
8. Keluarga Mahasiswa (Kema) FISIP Unhas yang menjadi wadah untuk bertumbuh dan berkontribusi bagi pengembangan diri dan menjadi ruang belajar bagi penulis. Bersama, Bersatu, Berjaya !.
9. Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas yang menjadi rumah, ruang untuk bertumbuh, berkembang dan melihat dunia dengan beragam perspektif. Menjadi Badan Pengurus adalah pengalaman yang paling

berkesan selama berada di ruang ini. Semoga tidak kehilangan identitas keilmuannya. Salam Hitam Putih, Himapolku, Himapolmu, Himapol kita semua.

10. Teman-teman Revolusi 2018, tanpa kalian kehidupan kampus akan terasa biasa-biasa saja.

11. Teman-teman Revolusi backpacker, Nasram, Yanti, Irdan, Kurni, Sulton, Ronal, Aria, Irdan, Ariyanto, terima kasih untuk lelucon, candaan, motivasi, dan berbagai pengalaman berharga lainnya. sampai jumpa pada jalan-jalan nekat lainnya.

12. Kakak-Kakak senior yang telah banyak membantu penulis dalam banyak hal. Khususnya Kak Fichri, Kak Galank, Kak Jonny, Kak Unil, Kak Ilman, Kak Naje, yang menjadi teman bertukar pikiran. Kak Widya, Kak Gazali, Kak Tommy, Kak Siska, Kak Eki, Kak Agung dan Kak Mar'ie kadang menyebalkan namun selalu membawa keceriaan, Kak Adi, Kak Harum, Kak Indra Gosal yang memfasilitasi tempat menulis skripsi yang nyaman.

13. Teman-teman KKN Unhas gel.107 luar Sul-Sel 2, Badaria, Sulton, Irdan, Wasilah, Bang El, Fatih, Ryan, Idul dan Titania yang memberi banyak keseruan, suka-duka, saling membagi pengalaman dan ilmu dan kebersamaan.

14. Kepada perempuan yang selalu menemani, menyayangi, dan mendukung penulis. Bersamamu selalu menyenangkan oleh karena itu aku abadikan di ini tulisan saja.

15. Terima Kasih kepada diri sendiri telah sebaik ini mencintai dirinya.

Ucapan terima kasih dan permohonan maaf kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerja samanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan demi perbaikan skripsi ini.

Makassar, 3 Agustus 2023

Taufiq Akbar Hidayat

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	4
ABSTRAK.....	5
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat penelitian :	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsep Ekologi Politik	11
2.2 Teori Kebijakan Publik	20
2.3 Evaluasi Dampak Kebijakan	27
2.4 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Lokasi Penelitian.....	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisis Data	44
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	46
4.1 Kabupaten Polewali Mandar	46

4.2	TPA Binuang Kab. Polewali Mandar	49
5.1.	Dampak Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Binuang	58
5.1.1.	Pengelolaan Sampah di TPA Binuang menyebabkan air lindi ke sawah masyarakat.....	68
5.1.2.	Pengelolaan Sampah di TPA Binuang Menyebabkan Polusi Udara yang Tercium Hingga Pemukiman Penduduk.	77
5.2.	Tindak Lanjut Pengelolaan Sampah di TPA Binuang.Kab. Polewali Mandar	83
BAB VI PENUTUP		99
6.1	Kesimpulan.....	99
6.2	Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....		106

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan suatu wilayah ditentukan oleh peningkatan jumlah penduduknya. Karena perkembangan dan peningkatan jumlah penduduk ini menyebabkan berbagai permasalahan kompleks suatu wilayah misalnya meningkatnya kebutuhan akan wilayah pemukiman, pertumbuhan penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan konsumsi masyarakat yang menyebabkan bertambahnya jumlah sampah sebagai akibat yang timbul akibat pola hidup manusia yang lekat dengan bahan sisa sehingga pengelolaan sampah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, tata kelola wilayah termasuk dalam bidang pengelolaan persampahan menjadi isu penting agar pengelolaan dan penataan suatu wilayah yang berkelanjutan dan layak huni dapat tercapai.

Sampah menjadi masalah global karena dapat menyebabkan gangguan-gangguan kesehatan, mempercepat krisis iklim, masalah ekologi seperti bau busuk, dapat mencemari tanah, air dan udara serta dapat menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Berdasarkan laporan dari World Bank, jumlah sampah padat yang diproduksi di kawasan perkotaan ini di seluruh dunia rata-rata mencapai 2,01 miliar ton per tahun. Dengan perkiraan di masa depan dalam kisaran antara 68 sampai 75 persen penduduk yang ada di dunia akan tinggal di wilayah perkotaan, sejalan

dengan itu maka diprediksi produksi sampah di wilayah perkotaan juga akan meningkat.¹ Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah instrumen untuk mengatur pengelolaan sampah agar sampah limbah masyarakat dapat diolah dan mengurangi dampak yang ditimbulkannya untuk memastikan tersedianya wilayah yang layak huni dan berkelanjutan.

Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama sebagai manusia yang mengelola lingkungan hidup agar kesinambungan alam dan manusia tetap terjaga. Hubungan antara alam dan manusia dapat dilihat dalam sebuah sistem politik. Alam sebagai tempat tersedianya sumber daya yang terbatas perlu dikelola oleh manusia agar dapat terdistribusi dengan baik dengan tetap menjaga kelangsungan tersedianya sumber daya tersebut untuk kehidupan di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk mengelola sumber daya yang ada di alam, manusia kemudian membentuk suatu sistem politik untuk menciptakan suatu instrumen berupa aturan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya yang menjamin kelangsungan hidup masyarakat. salah satunya berupa kebijakan pengelolaan sampah.

Kebijakan pengelolaan persampahan di Indonesia di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan sebagai bentuk upaya pengelolaan sampah, pembagian kewenangan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah dengan tujuan

¹ Subianto, D. "Pentingnya Peningkatan Tata Kelola Sampah di Kawasan Perkotaan" Mongabay.co.id, 20 Februari 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/02/20/pentingnya-peningkatan-tata-kelola-sampah-di-kawasan-perkotaan/>

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Penelitian yang dilakukan oleh *Sustainable Waste Indonesia* (SWI) pada tahun 2018 terkait Analisis Arus Limbah Indonesia melihat bahwa Indonesia sebanyak 24 persen sampah masih tidak terkelola. Dari sekitar 65 juta ton sampah yang dihasilkan setiap hari, sekitar 15 juta ton mengotori ekosistem dan lingkungan karena tidak dilakukan pengelolaan. Sedangkan 7 persen sampah yang didaur ulang dan 69 persen berakhir di Tempat Pembuangan Akhir. Berdasarkan Artikel dari *Waste 4 Change* pada tahun 2020, kurang lebih 450 TPA di kota besar dengan sistem *open dumping* dan baru sebagian kecil yang dikembangkan menjadi *controlled landfill* dengan potensi sampah yang dihasilkan mencapai 4 juta ton/tahun. Sedangkan potensi gas metana yang dihasilkan mencapai 11.390 ton CH₄ / tahun yang setara dengan 239.199 ton CO₂ / tahun.²

Metode umum yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan metode *open dumping dan landfill*. *Open dumping* merupakan metode pengelolaan sampah yang hanya menempatkan sampah di lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) saja tanpa tindakan atau penanganan lebih lanjut. Sedangkan metode *landfill* merupakan metode pengolahan sampah dengan cara diratakan dan

² Waste 4 Change, "Fasilitas Pengelolaan Sampah TPS, TPS 3R, TPST, dan TPA beserta Fungsinya" Waste4Change, 17 April 2020, https://waste4change.com/blog/fungsi-tps-tps-3r-tpst-dan-tpa/#Infografik_Fasilitas_TPS_TPS_3R_TPST_dan_TPA

dipadatkan menggunakan alat berat kemudian ditimbun menggunakan tanah.

Metode *open dumping* dan *landfill* tersebut tidaklah ramah lingkungan karena berpotensi menimbulkan dampak berupa pencemaran lingkungan, misalnya pencemaran air, tanah serta udara. Dampak pencemaran lingkungan akibat kegagalan pengelolaan sampah pernah terjadi di TPA Cirendeu, Leuwigajah, Kota Cimahi Jawa Barat pada 21 Januari 2005. Di mana pada TPA tersebut terjadi ledakan akibat menumpuknya gas metana yang timbul dari tumpukan sampah, ledakan tersebut kemudian memicu terjadinya longsor yang menimbulkan sekurangnya 157 korban jiwa³.

Hal yang dipaparkan di atas yang membuat pengelolaan sampah sebagai indikator berjalannya tata kelola wilayah yang baik, karena pengelolaan wilayah yang belum efektif dapat berpengaruh pula pada pengelola layanan publik pada bidang lainnya misalnya kesehatan, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Pemerintah daerah Kab. Polewali Mandar juga mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tentang Pengelolaan Sampah, di mana dalam melakukan pengelolaan sampah di TPA harusnya menggunakan metode lahan urug terkendali, lahan urug saniter dan teknologi ramah lingkungan

³ Pentingnya Peningkatan Tata Kelola Sampah di Kawasan Perkotaan - Mongabay.co.id :
Mongabay.co.id

untuk mengurangi dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh sampah sebelum dikembalikan ke lingkungan.

Berdasarkan laporan kinerja daerah Kab. Polewali mandar khususnya pada bidang persampahan, Kab. Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat yang memperoleh penganugerahan Adipura dari Presiden RI pada tahun 2019. Produksi sampah Kab. Polewali Mandar adalah sebanyak 199.541 m^3 setiap tahunnya. Sampah perkotaan 660 Ton per tahun, sampah terangkut 77.040 m^3 per tahun, sampah berhasil daur ulang sebanyak 266 ton per tahun. Dengan layanan sampah yang tersebar di 10 kecamatan yakni Polewali, Binuang, Anreapi, Matakali, Wonomulyo, Campalagian, Luyo, Balanipa, Tinambung, dengan 18 lokasi Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Dengan tenaga kebersihan sebanyak 215 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 190 orang dan perempuan sebanyak 25 orang. Adapun sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah yang dimiliki.⁴

Kehadiran TPA di Polewali Mandar sebagai bentuk kebijakan politik dalam menangani masalah sampah di Kab. Polewali Mandar khususnya TPA Binuang kemudian mengantarkan Kab. Polewali Mandar mendapatkan penghargaan Adipura pada Tahun 2019 tersebut. Namun disisi lain TPA Binuang menjadi hal yang kontradiktif karena mendapatkan mendapat

⁴ Polewali Mandar.go.id, "Kinerja Daerah Bidang Persampahan" 29 Desember 2020, <https://www.polmankab.go.id/Halaman/detail/kinerja-daerah>

penolakan dari masyarakat disebabkan hadirnya TPA ini telah menyebabkan pencemaran lingkungan .

Pencemaran lingkungan yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang yang paling berdampak ialah merembesnya air lindi dari TPA dan merendam sawah masyarakat, sehingga sawah tersebut berubah menjadi kubangan lumpur berwarna kehitaman serta berbau busuk. Hal ini juga mengakibatkan padi yang ditanam tidak semua berhasil dipanen.⁵ Merembesnya air limbah dari TPA ke sawah warga juga menyebabkan para petani yang menggarap lahan mengalami gatal dan ruam merah pada permukaan kulit tangan dan kaki mereka.

Dampak lain yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang yakni adanya polusi udara yang tercium hingga pemukiman penduduk yang juga berpengaruh pada kualitas kakao yang menjadi komoditas warga yang tinggal di sekitar TPA. Bau busuk membuat ribuan lalat menghingapi daun kakao hingga berpengaruh pada penurunan kualitas buah kakao yang dihasilkan.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan melalui citra satelit, jarak TPA Binuang terlalu dekat dengan wilayah produktif masyarakat. Hal ini kemudian membuat masyarakat Desa Paku merasakan secara langsung dampak yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang. Pencemaran lingkungan yang timbul akibat pengelolaan sampah di TPA

⁵ Alimuddin, Ridwan. "TPA Binuang TPA Terbaik di Sulbar ?", Mandar untuk Nusantara, 18 Januari 2022, <http://ridwanmandar.blogspot.com/2022/01/tpa-binuang-tpa-terbaik-di-sulbar.html>

Binuang inilah yang membuat masyarakat melakukan protes kepada pemerintah Kab. Polewali Mandar dan mendesak agar TPA Binuang ditutup⁶.

Sementara itu respons pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Polewali Mandar ingin melakukan rehabilitasi terhadap TPA Binuang, sesuai dengan arahan Dirjen PSLB3 KLHK dan LHK RI yang melakukan kunjungan ke lokasi TPA. Hal ini kemudian yang membuat masyarakat semakin keras untuk melakukan penolakan karena merasa tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah TPA⁷. Masalah lain yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang adalah kebijakan ditutupnya TPA Binuang pada tanggal 8 Juni 2021, oleh Pemerintah Kab. Polewali Mandar yang menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang akan ditutup pada Desember 2021.

Kontradiksi yang terjadi dalam pengelolaan sampah yang terjadi di Kab. Polewali Mandar di mana citra Kab. Polewali Mandar sebagai kota Adipura dengan TPA Binuang sebagai penunjangnya disisi lain justru mengakibatkan pencemaran lingkungan yang berpengaruh dengan kondisi sosial masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Binuang. Penutupan TPA juga menyebabkan tidak jelasnya proses pengelolaan sampah dikarenakan tidak ada kebijakan lebih lanjut dari pemerintah kabupaten terkait

⁶ Mawan, Agus. "Kala TPA Binuang Cemari Lahan Pertanian Warga", Mongabay.co.id, 10 Agustus 2021, <https://www.mongabay.co.id/2021/08/10/kala-tpa-binuang-cemari-lahan-pertanian-warga/>

⁷ Radar Sulbar, "Pembukaan TPA Binuang Masih Ditolak Warga", Radar Sulbar, 8 Februari 2022, <https://radarsulbar.co.id/pembukaan-tpa-binuang-masih-ditolak-warga/>

pemrosesan akhir sampah pasca ditutupnya TPA Binuang sehingga membuat tumpukan sampah di beberapa wilayah kecamatan. Hal ini harusnya mendapatkan perhatian serius dikarenakan sampah merupakan masalah yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa pengelolaan yang jelas. Hal ini bisa menjadi bom waktu mengingat dampak yang dapat ditimbulkan oleh sampah seperti rusaknya keindahan kota, menimbulkan masalah kebersihan dan bau busuk dari tumpukan sampah yang kemudian bisa berdampak pada kesehatan bahkan jika dibiarkan tutup tanpa pengelolaan bisa saja terjadi ledakan gas seperti pada kasus TPA Leuwigajah pada tahun 2005.

Dampak dari pengelolaan sampah di TPA Binuang melahirkan pencemaran lingkungan yang disebabkan merembesnya air limbah dari TPA ke sawah masyarakat dan polusi udara yang disebabkan bau dari tumpukan sampah yang membuat masyarakat menolak dan menuntut penutupan TPA Binuang. Kemudian ditutupnya TPA Binuang pada Desember 2021 kemudian membuat tidak jelasnya pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir membuat tumpukan sampah di beberapa titik.

Hal ini kemudian membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang di Kab. Polewali Mandar menggunakan konsep ekologi politik untuk melihat hubungan antara pencemaran lingkungan yang timbul dari kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang dengan aspek sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan oleh masyarakat di wilayah tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan oleh masyarakat sekitar TPA ?
2. Bagaimana tindak lanjut kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang Kab. Polewali Mandar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hubungan antara dampak kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang terhadap aspek sosial, ekonomi dan politik yang dirasakan oleh masyarakat sekitar TPA.
2. Untuk mengetahui bagaimana tindak lanjut kebijakan pengelolaan sampah di TPA Binuang

1.4 Manfaat penelitian :

1. Manfaat Teoritis

- a) Menjawab fenomena sosial-politik terkait kebijakan pengelolaan sampah di Kab. Polewali Mandar.
- b) Menunjukkan secara ilmiah kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan konsep ekologi politik.

- c) Memperkaya khazanah kajian Ilmu politik untuk perkembangan keilmuan, khususnya politik kontemporer.

2. Manfaat praktis :

- a) Memberikan bahan rujukan bagi yang berminat dalam memahami Kebijakan Pengelolaan sampah di Polewali Mandar.
- b) Sebagai bahan bacaan atau referensi bagi penelitian dalam bidang yang serupa.
- c) Salah satu prasyarat memperoleh gelar sarjana ilmu politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi penjelasan tentang penjelasan pendekatan dan teori yang relevan dengan rumusan masalah penelitian ini. Pendekatan dan teori ini digunakan sebagai alat analisis untuk memahami “ Dampak Pengelolaan Sampah di TPA Binuang Kab. Polewali Mandar”. Untuk menjelaskan masalah tersebut, penulis kemudian menggunakan Konsep ekologi politik, teori kebijakan dan evaluasi dampak kebijakan publik yang akan diuraikan sebagai berikut:

2.1 Konsep Ekologi Politik

Ekologi merupakan sebuah studi yang berfokus untuk menggambarkan dampak dari hubungan antara manusia dan lingkungan hidup termasuk dengan spesies lainnya. Lebih lanjut, Forsyth (2003) menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada lingkungan ini juga adalah hasil dari hubungan antara manusia dan spesies lainnya. ekologi tidak hanya terbatas pada penjelasan tentang dampak manusia terhadap lingkungannya tetapi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis dalam melihat interaksi manusia secara keseluruhan.⁸

⁸ Timothy Forsyth, "Critical Political Ecology: The Politics of Environmental Science", *Progress in Development Studies*, 2003, hlm 4-5.

Sementara Ekologi Politik sendiri merupakan istilah yang mencakup berbagai definisi, di antaranya : Menurut Hempel (1996) ekologi politik merupakan studi yang menjelaskan tentang hubungan saling ketergantungan antara unit-unit politik dan lingkungannya, di mana ekologi politik berfokus pada konsekuensi politik dari perubahan lingkungan. Dalam pandangan lain menurut Watts (2000), ekologi politik adalah studi untuk memahami hubungan kompleks antara alam dan masyarakat melalui analisa terhadap bentuk akses dan kontrol atas sumber daya dan pengaruhnya terhadap kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan.⁹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekologi politik mengarah pada upaya untuk menggabungkan objek kajiannya pada ekonomi dan politik secara luas yang mencakup hubungan antara masyarakat dan sumber daya, serta hubungan antara kelas dan kelompok sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagaimana dikutip dari Syatori, Ekologi politik merupakan kondisi sosial politik terkait penyebab, pengalaman, dan pengelolaan masalah lingkungan.¹⁰

Konsep tentang ekologi politik berkembang pada kurun waktu 1960-1970an, di mana kajian yang menggabungkan analisis ekologi dengan politik muncul pada tahun 1960-an yang berawal dari kekhawatiran tentang dampak manusia terhadap lingkungannya.¹¹ Dari penelitian Neumann

⁹ Paul Robbins, "*Political Ecology: A Critical Introduction Second Edition*", 2012, hlm.

¹⁰ A Syatori, 'Ekologi Politik Masyarakat Pesisir (Analisis Sosiologis Kehidupan Sosial-Ekonomi Dan Keagamaan Masyarakat Nelayan Desa Citemu Cirebon)', *Jurnal Holistik*, 15.2 (2014), 241.

¹¹ Timothy Fositt, loc.cit.,hlm 4-5

(2005) dan Robbins (2003) dapat disimpulkan bahwa ekologi politik berfokus pada dua hal, pertama: ekologi politik berfokus pada “skala” yang digunakan para ilmuwan dalam melakukan penelitian ekologi politik untuk melakukan identifikasi dan melakukan analisa pada hubungan antara perubahan lingkungan dengan kondisi sosial, politik, budaya dan ekonomi pada ranah konseptual dan fisik. Kedua: berfokus pada implikasi berbagai bentuk kuasa sebagai hal yang penting untuk memahami bagaimana gagasan tentang kesinambungan diciptakan dan disebarkan.¹²

Asumsi utama dalam ekologi politik menurut Bryant, didasarkan pada pandangan bahwa perubahan lingkungan tidak terjadi secara alamiah, bersifat netral atau berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh politisasi terhadap lingkungan yang melibatkan aktor yang memiliki kepentingan baik ditingkat lokal, regional, maupun global. Ekologi politik melihat bahwa perubahan lingkungan yang terjadi akibat adanya dominasi dari aktor-aktor yang memiliki kepentingan. Aktor yang dominan dalam proses politisasi lingkungan umumnya adalah negara dan swasta. Dominasi ini kemudian menyebabkan akses masyarakat pada pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam makin dibatasi sehingga akses masyarakat untuk melakukan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lemah sehingga masyarakat semakin marjinal. Fenomena dominasi ini kemudian dikena sebagai “tragedy of enclosure”. Tujuan dari analisis yang dilakukan dalam

¹² Murat Arsel, “Ekologi Politik: Dimana Ekonominya?”, *Junral Tanah Air* Edisi Oktober-Desember 2009, hlm. 11.

Ekologi politik tidak hanya mencoba untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi analisis yang menjadi fondasi yang penting dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan.

Konsep ekologi politik menurut Bryant sebagaimana dikutip dari Qadim, dikembangkan untuk menggambarkan dimensi, kondisi dan memahami kompleksitas politik dari perubahan lingkungan yang terjadi, utamanya di negara berkembang. Tujuan dari ekologi politik adalah untuk memberikan analisis dan memahami hubungan sebab-akibat antara manusia dan lingkungannya. Ekologi politik memiliki tiga dimensi utama dalam menjelaskan fenomena perubahan lingkungan.¹³

Dimensi pertama terletak pada sumber politik. di mana dalam dimensi ini fenomena perubahan lingkungan dipengaruhi oleh kebijakan negara, hubungan antar negara dan kapitalisme global yang memberikan tekanan nasional dan global terhadap masalah lingkungan. dimensi kedua berfokus pada kondisi. Di mana perubahan lingkungan yang terjadi dilihat sebagai akibat dari konflik-konflik yang timbul dari perlawanan masyarakat lokal. Ekologi politik dalam hal ini menekankan penjelasannya pada bagaimana sekelompok masyarakat dengan kekuasaan terbatas dapat dan terus berjuang untuk mempertahankan kondisi suatu lingkungan. Dimensi

¹³ Abd. Qadim HS, Tesis: "*Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri (Tnmb) Kabupaten Jember Dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional*" (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2012), hlm.20

ketiga yaitu ramifikasi atau konsekuensi politik perubahan lingkungan dengan penekanan pada dampak sosial ekonomi dan proses politik.¹⁴

Ketiga dimensi ekologi politik di atas kemudian menurut Bryant & Bailey dipengaruhi oleh lima aktor, yakni; negara, pebisnis, organisasi internasional, NGO dan gerakan akar rumput. Berdasarkan hubungan ini, negara memiliki peran ganda yakni sebagai aktor pelindung sumber daya alam sekaligus sebagai pengguna. Peran ganda ini sering kali membuat negara berada pada konflik kepentingan. Peran negara secara teori dan praktiknya banyak dikritik dan mendapatkan resistensi karena negara - negara di dunia mempersulit upaya pemecahan masalah lingkungan, demi kepentingan pembangunan ekonomi, lingkungan hidup sering kali menjadi korban demi hal tersebut. Selanjutnya negara - negara di dunia juga tidak memiliki kapasitas untuk memecahkan lingkungan dalam berbagai level.¹⁵

Secara strukturalis menurut Forsyth, ekologi politik merupakan sebuah usaha untuk memahami hubungan antara kapitalisme dan kebijakan negara yang memberikan dampak pada masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan. lebih lanjut, Watts dan Robbins menjelaskan bahwa ekologi politik mencoba untuk menganalisis kompleksitas hubungan antara alam dan masyarakat yang menimbulkan akses dan kontrol terhadap sumber daya dan dampaknya bagi kesehatan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan. Tujuannya untuk menjelaskan konflik

¹⁴.Ibid. Hal 20.

¹⁵ Ibid. Hal.20-21

lingkungan terutama dalam hal 'pengetahuan, kekuasaan, praktik dan politik keadilan dan pemerintahan.'¹⁶

Lebih lanjut menurut Robbins mengidentifikasi fenomena perubahan lingkungan yang terjadi dari kaca mata ekologi politik melalui empat pendekatan, yakni:

- a. Degradasi dan marginalisasi, bahwa isu perubahan lingkungan yang terjadi sebagai dampak dari eksploitasi yang berlebihan dan berujung pada kemiskinan (kemiskinan dan marginalisasi).
 - b. Konflik lingkungan, melihat bahwa konflik terjadi karena kelangkaan sumber daya akibat pemanfaatan dari negara, swasta dan elit sosial yang kemudian mempercepat konflik antar kelompok (gender, kelas dan etnik).
 - c. Konservasi dan kontrol sumber daya, pendekatan ini melihat bahwa konservasi adalah akibat dari hilangnya peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya serta pengabaian mata pencaharian dan organisasi ekonomi mereka hanya karena untuk melindungi lingkungan.
 - d. Identitas lingkungan dan gerakan sosial, pendekatan ini melihat bahwa gerakan sosial politik terkait dengan upaya untuk mempertahankan mata pencaharian dan perlindungan lingkungan.
- dalam proses di atas, kepentingan pemerintah dalam

¹⁶ Ibid. Hal. 21.

mempertahankan keberlanjutan lingkungan justru menyingkirkan sistem mata-pencarian lokal, produksi, dan organisasi sosial politik.¹⁷

Perubahan lingkungan yang terjadi di suatu wilayah menurut Blaikie (1985) merupakan akumulasi dari berbagai proses sosial, ekonomi dan politik dalam konteks lokal dan di luar wilayah tersebut yang berpengaruh pada persoalan akses dan kontrol atas sumber daya alam di suatu wilayah tertentu. Menurut Blaikie, faktor lokal setempat yang ikut mempengaruhi perubahan lingkungan antara lain adalah proses pengambilan keputusan di dalam kelompok atau komunitas yang bersangkutan, eksistensi dari institusi lokal (aturan adat, norma dan aturan informal lainnya) yang mempengaruhi akses dan kontrol atas pemanfaatan sumber daya alam bagi individu, keluarga, maupun kelompok masyarakat. Sedangkan faktor-faktor di luar faktor lokal antara lain: kebijakan pemerintah atas penguasaan lahan dan alokasi pemanfaatan sumber daya alam, interaksi antar aktor yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk mendapatkan akses dan kontrol atas sumber daya alam.¹⁸

Ekologi politik melihat bahwa perubahan lingkungan (baik kerusakan maupun perbaikan) merupakan hasil dari kebijakan ekonomi politik yang muncul dari proses interaksi berbagai aktor dalam suatu wilayah tertentu.

¹⁷ Ibid. Hal. 22

¹⁸ Suraya Afif, "Pendekatan Ekologi Politik: Sebuah Pengantar", Jurnal Tanah Air. Edisi Oktober-Desember 2009, Hal. 25-26.

Setiap aktor, baik pemerintah, masyarakat, maupun kelompok kepentingan tidak dilihat sebagai kelompok yang monolitik dan homogen di mana perlawanan maupun kerja sama dimungkinkan muncul antara individu atau kelompok baik dalam kategori aktor maupun lintas aktor. Ekologi politik menurut Bryant mendorong pengkajinya untuk mempertanyakan dua hal. Pertama, sejauh mana biaya dan bagaimana ketidaksetaraan distribusi biaya lingkungan ini melanggengkan ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang sedang berlangsung. Kedua, dalam situasi seperti apa kondisi ketidaksetaraan yang dipengaruhi perubahan lingkungan mempengaruhi proses politik yang ada.¹⁹

Analisis ekologi politik terhadap fenomena perubahan lingkungan juga dapat dijelaskan melalui pendekatan subjek dan objek. Dengan meminjam konsep metabolisme kota dari Heynen, Kaika dan Swyngedouw (2006;6) yang mengemukakan bahwa kota secara harfiah bukanlah suatu organisme, tetapi juga proses alami yang bekerja di kota yang bebas dari ikatan sosial dan batasan politik. Dalam teori ini dikatakan bahwa; “proses alamiah seperti fotosintesis, gravitasi dan lain-lain tidak diproduksi secara sosial, namun potensinya dimobilisasi secara sosial dalam pengaturan metabolisme biokimia dan fisik tertentu untuk melayani tujuan tertentu.”²⁰

Konsep metabolisme kota di atas menggambarkan adanya hubungan antara kota dan aktor kepentingan yang kuat seperti politisi,

¹⁹ Ibid. Hal 27

²⁰ Paul Robbins, op.cit. Hal.73

pihak swasta dan lainnya untuk menggunakan dan menyalurkan sumber daya alam ke tempatnya untuk meningkatkan sewa, mengembangkan properti mendorong pertumbuhan dan mengendalikan warga. akan tetapi konsep ini menggambarkan pula efek dari upaya penggunaan sumber daya di atas terhadap perubahan lingkungan yang terjadi seperti sampah, banjir, pemanasan global dan masalah sosial lainnya.²¹

Konsep metabolisme kota dalam ekologi politik ini memberikan gambaran bahwa kota pada dasarnya alami, di mana kota dihuni oleh penduduk manusia dan non-manusia, dan didukung oleh proses ekologi. Hal ini juga berarti bahwa penduduk manusia maupun non-manusia dan proses ekologinya terikat oleh proses politik dan perebutan kepentingan yang membentuk kehidupan di kota.

Korelasi antara konsep metabolisme kota dalam penelitian ini kemudian akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana permasalahan pengelolaan sampah di TPA Binuang Kab. Polewali Mandar kemudian sebagai proses metabolisme kota yang melihat hubungan antara manusia dan non-manusia di wilayah itu sebagai dampak dari proses politik dan perebutan kepentingan yang terjadi. Dalam melihat fenomena perubahan lingkungan yang terjadi di TPA Binuang Kab. Polewali Mandar berdasarkan Ekologi politik menjelaskan bahwa fenomena perubahan lingkungan (kerusakan ekologis dan konflik perebutan akses sumber daya) yang terjadi

²¹ Ibid. Hal. 73-74

di lingkungan sekitar TPA Binuang Kab. Polewali Mandar merupakan dampak dari kebijakan politik yang mengatur tentang pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA tersebut.

2.2 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan menurut Heywood jika dimaknai secara umum adalah serangkaian aksi. Kebijakan dalam pandangan ini menggambarkan bahwa sebuah keputusan formal telah dibuat yang memberikan persetujuan formal pada sebuah rencana aksi tertentu. Oleh karena itu, menurut Heywood kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan-keputusan formal dari badan-badan pemerintahan.²²

Lebih lanjut, Heywood menjelaskan bahwa kebijakan lebih baik dipahami sebagai hubungan antara gagasan, aksi dan hasil. Pada tingkat gagasan kebijakan publik menggambarkan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pada tingkat aksi, kebijakan publik dipahami sebagai apa yang dilakukan pemerintah. Sedangkan pada tingkat hasil, kebijakan publik menggambarkan pengaruh pemerintah pada kehidupan masyarakat luas.²³

Kebijakan publik menurut Heywood adalah salah satu aspek politik yang memiliki dampak paling besar pada masyarakat. kebijakan publik menggambarkan bagaimana pengaruh pemerintahan terhadap masyarakat, baik kemampuan pemerintah dalam menghasilkan perbaikan atau justru kerusakan (pemburukan) dalam masyarakat.

²² Andrew Heywood, *Politics* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm 621.

²³ Ibid. Hlm. 622

Kebijakan publik berkaitan erat dengan tata kelola negara, mengatur interaksi antara negara dengan masyarakatnya. Pemerintah dalam mengelola negara tidak hanya mengendalikan arah dan tujuan negara, tetapi juga mengelola negara agar lebih baik lewat kebijakan publik yang dibuat. Menurut Parsons, kekuasaan yang dimiliki oleh negara dapat dipertahankan melalui kebijakan publik, bukan dengan kekuatan paksa. Negara adalah pemilik kekuasaan yang sah, maka kebijakan publik dimaknai sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan dengan harapan bahwa tujuan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat tercapai.²⁴

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa kebijakan publik tidak hanya dipahami dalam lingkup teknis administratif saja, tetapi juga dipahami sebagai persoalan yang berlangsung dalam ranah politik. karena kebijakan publik terkait dengan penggunaan kekuasaan. Perspektif kekuasaan dalam kebijakan publik digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara negara dan rakyat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ndraha bahwa fungsi pemerintah adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya sebagai konsumen dari produk pemerintah, melalui pelayanan publik dan pelayanan sipil.

Hubungan antara negara dan rakyat dalam kebijakan publik juga dapat dipahami melalui teori dari Levitsky dan Helmke yang menjelaskan mengenai tipologi relasi antara Negara. Sebagaimana dikutip dari

²⁴ Eko Handoyo, Kebijakan Publik (Semarang: Widya Karya, 2008), hlm, 7

Sebastian, P. dkk, dalam “Praktik Penelitian Kualitatif: Pengalaman UGM”, Menurut Levistky dan Helmke terdapat empat tipologi yang dapat menjelaskan hubungan antara kelompok masyarakat dengan Negara, yakni:

1. Tipologi Complementary, pola relasi ini menggambarkan bahwa hubungan antara kelompok masyarakat dan negara mendekat namun Institusi Formal (Negara) berjalan efektif. Dalam tipologi ini yang terjadi adalah kelompok masyarakat melingkupi Institusi Formal (Negara) Negara (kelompok masyarakat mengisi lubang yang belum diisi Negara). Selain itu ciri lain dari tipologi ini menciptakan insentif dalam masyarakat lokal, yang memiliki fungsi pelayanan terhadap masyarakat.
2. Tipologi Subtitusion, tipologi ini terjadi apabila pola hubungan antara komunitas terhadap Negara saling mendekat, tetapi Institusi Formal (Negara) Negara tidak berjalan efektif. Kondisi ini kemudian menyebabkan kelompok masyarakat menggantikan peran dari Institusi Formal (Negara) Negara. Ketidakefektivan Negara menurut Levitsky adalah kondisi melemahnya kepatuhan terhadap peraturan formal dan tidakmampuan institusi Negara menciptakan kepentingan kelompok masyarakat, bersamaan dengan itu terjadi penguatan terhadap kepatuhan nilai, norma dan tradisi yang berkembang dalam komunitas

Dalam tipologi ini berperannya kelompok masyarakat yang menggantikan Institusi Formal (Negara) negara dianggap mampu merespons dan mengarahkan kepentingan bersama.

3. Tipologi Accomodating, pola hubungan ini terjadi apabila Institusi Formal (Negara) negara berjalan efektif, tetapi hubungan negara dengan kelompok masyarakat menjauh sehingga timbul akomodasi institusi komunitas terhadap institusi Negara. Dalam hal ini, kelompok masyarakat dapat membuat peraturan yang bersumber dari norma/nilai dalam kelompoknya untuk mengatur perilaku anggota atau warganya, dengan secara tidak langsung merubah nilai substantif dari peraturan formal. Sehingga yang terjadi adalah peraturan komunitas itu menegakkan aturan formal Negara.
4. Tipologi Competiting, pola hubungan ini terjadi apabila kemampuan Institusi Formal (Negara) negara tidak efektif, dan hubungan antara kelompok masyarakat dan negara menjauh sehingga timbul persaingan antara kelompok masyarakat dan Institusi Formal (Negara) Negara. Pola hubungan ini juga muncul karena tidak berdayaan Negara dalam menjalankan fungsinya sehingga menimbulkan pelanggaran dan perlawanan terhadap peraturan-peraturan formal.²⁵

Pemerintah melakukan pelayanan publik, karena pemerintah merupakan badan publik yang dibuat dengan tujuan untuk melayani

²⁵ PolGov, *“Praktek Penelitian Kualitatif: Pengalaman dari UGM”*, Research Center for Politics and Government (PolGov) Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan FISIPOL Universitas Gajah Mada hlm. 51-52.

kepentingan publik. sedangkan dalam melakukan pelayanan sipil, pemerintah harus memberikan pelayanan kepada setiap individu yang membutuhkan. Dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah sebagai pihak yang menguasai sumber daya ekonomi, politik, budaya dan militer berada di posisi yang sangat berkuasa dalam mengatur kehidupan masyarakat. sedangkan masyarakat sebagai pihak yang subordinat harus siap dikendalikan oleh pemerintah. dari hubungan ini, dapat dilihat bahwa pemerintah dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan masyarakat, mulai dari mengelola konflik, mengorganisasikan masyarakat untuk berkonflik juga dapat menarik uang (pajak) dari masyarakat.²⁶

Proses kebijakan publik berjalan pada serangkaian keputusan yang berbeda tentang apa langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah, bagaimana pelaksanaannya dan kapan ia harus dilaksanakan. Persoalan yang ingin diselesaikan melalui kebijakan publik tidak hanya berhenti di situ, ketika kebijakan publik dijalankan , maka masalah-masalah lain muncul. Inilah yang disebut sebagai siklus kebijakan. Hal ini terjadi karena berkaitan dengan apakah kebijakan yang telah dilaksanakan telah sesuai dengan tujuan-tujuan kebijakan. Secara umum menurut Heywood, proses kebijakan dibagi menjadi empat tahapan:

²⁶ Ibid. Hlm, 8-9.

a. Usulan kebijakan

Usulan kebijakan merupakan proses di mana isu-isu yang ingin diselesaikan melalui kebijakan publik ini dibentuk melalui agenda politik. mulai dari pendefinisian dan bagaimana masalah tersebut ditangani. Usulan kebijakan dapat muncul dari atas yakni melalui para pemimpin politik dan dapat pula muncul dari bawah melalui tekanan dari opini publik, media massa, partai politik kelompok kepentingan dan sebagainya.

b. Perumusan kebijakan

Perumusan kebijakan merupakan tahap yang berjalan ketika sebuah isu telah masuk ke dalam agenda politik. hal ini dikarenakan ketika isu telah masuk ke dalam agenda politik, maka isu ini perlu untuk di analisis secara rinci untuk mengembangkan usulan kebijakan yang sistematis.

Berdasarkan teori siklus Hoogwood dan Gunn, tahapan pertama dalam perumusan kebijakan adalah menetapkan mekanisme dan prosedur dan pelaku politik yang harus dilibatkan dalam analisis dan penjabaran kebijakan. Tahapan kedua berkaitan tentang pendefinisian isu dan penentuan arah kebijakan. Tahapan ketiga adalah penyusunan tujuan dan skala prioritas. Terakhir adalah analisis dan tinjauan ulang terhadap pilihan-pilihan dari kebijakan hal ini dilakukan untuk menyediakan

alternatif pilihan kebijakan untuk pertimbangan efisiensi dan efektivitas kebijakan.

c. Implementasi kebijakan

Setelah kebijakan ditetapkan, maka kebijakan kemudian diimplementasikan. Hood berpendapat bahwa untuk tercapainya proses implementasi yang sempurna maka ada beberapa kondisi yang diperlukan yakni

- 1) Sebuah sistem administrasi yang terpadu dengan sebuah garis otoritas tunggal agar ada kontrol secara terpusat pula.
- 2) Norma dan aturan yang seragam dan berlaku di seluruh bagian sistem.
- 3) Kepatuhan yang sempurna atau kontrol yang maksimal.
- 4) Informasi, komunikasi, dan koordinasi yang maksimal dari para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

Tantangan dalam implementasi kebijakan menurut Heywood adalah menciptakan kondisi seperti yang dipaparkan Hood diatas. Hal ini disebabkan karena para implementator kebijakan juga memiliki pemahaman tersendiri yang mempengaruhi tindakannya dalam mengimplementasikan kebijakan hal ini dalam analisis kebijakan publik dikenal dengan istilah *bottom-up* yang menekankan kepada fleksibilitas. Menurut Pressman dan Wildavsky fleksibilitas dapat muncul salah satunya karena para implementator kebijakan menggunakan pertimbangan

pengalaman dan pengetahuan mereka untuk menjamin bahwa implementasi kebijakan berjalan efektif dan juga karena ingin melindungi kepentingan profesionalitas dari para implementator kebijakan.

d. Evaluasi kebijakan

Proses kebijakan publik berpuncak pada evaluasi dan peninjauan kembali kebijakan untuk memberikan pertimbangan untuk memelihara, meneruskan atau menghentikan suatu kebijakan. Tahap ini, informasi yang diperoleh dapat menjadi umpan balik untuk masuk ke dalam sistem dan agenda politik untuk menjadi ajuan kebijakan berikutnya.

Evaluasi kebijakan selain untuk melihat bagaimana efektifnya kebijakan publik yang secara khas dapat dilakukan melalui analisis biaya-manfaat, evaluasi juga memerhatikan masalah-masalah prosedur kebijakan.²⁷

2.3 Evaluasi Dampak Kebijakan

Kebijakan yang telah dibuat, ditetapkan dan diimplementasikan oleh pemerintah sebagai bagian tugasnya selaku pengelola negara kemudian haruslah di evaluasi. Sebagaimana yang dikutip dari Lester dan Stewart dalam Winarno, evaluasi kebijakan secara umum dapat dipahami sebagai aktivitas penilaian kebijakan yang mencakup tentang, substansi, implementasi kebijakan serta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan

²⁷ Andrew Heywood. Op.Cit. 631-641

penjelasan Lester dan Stewart tersebut dapat dilihat bahwa evaluasi kebijakan merupakan kegiatan fungsional di mana evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dalam seluruh proses kebijakan. Lebih lanjut, Dunn memberikan definisi yang lebih spesifik tentang evaluasi kebijakan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai nilai dan manfaat hasil kebijakan.²⁸

Evaluasi kebijakan menurut Wollmann adalah alat atau prosedur analisis kebijakan publik untuk mengukur dua hal, pertama untuk mendapatkan informasi terkait penilaian kinerja baik dari segi proses implementasi maupun hasil pelaksanaan kebijakan. Kedua, sebagai tahap dari siklus kebijakan untuk menjadi input selanjutnya dalam sistem politik.²⁹

Berdasarkan definisi evaluasi kebijakan yang diberikan Wollmann di atas, evaluasi kebijakan merupakan sebuah proses dalam analisis kebijakan publik. analisis kebijakan publik sendiri menurut Parsons adalah kajian antar disiplin ilmu terhadap kebijakan publik dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan mengkontekstualisasikan model dan riset tersebut yang sifatnya orientasi atau fokus pada masalah (*problem oriented*).³⁰

Lebih lanjut, Parsons memberikan batasan yang membedakan antara analisis studi implementasi dan analisis evaluasi di mana menurutnya evaluasi kebijakan digunakan untuk melihat bagaimana hubungan antara kebijakan dan orang-orang yang menyampaikannya

²⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses* (Yogyakarta:Media Pressindo,2007), hal. 226

²⁹ Frank Fischer, Gerald J. Miller, and Mara S. Sidney, 'Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik Dan Metode', 2015, hal. 554.

³⁰ Sahya Anggara, op.cit. hal. 272

dapat dilai, diperiksa, diaudit, dinilai dan dikendalikan. Sedangkan implementasi kebijakan berbicara tentang bagaimana kebijakan diwujudkan dalam praktik dan tindakan.³¹

Evaluasi terhadap kebijakan menjadi sesuatu yang penting dan tak terpisahkan menurut W.N. Dunn dan Ripley karena evaluasi kebijakan berfungsi untuk memenuhi akuntabilitas publik. evaluasi kebijakan dilakukan untuk memperoleh informasi terkait efek dan dampak kebijakan, serta untuk melihat kesesuaian antara program (kebijakan) dengan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi dampak kebijakan menurut Winarno merupakan upaya untuk melihat dampak dari kebijakan secara aktual pada masyarakat. evaluasi dampak berfokus pada hasil dan dampak kebijakan dari pada proses pelaksanaan kebijakan. Dye sebagaimana dikutip dalam Winarno, memberikan lima dimensi dampak dari suatu kebijakan publik yang penting diperhatikan dalam evaluasi, yaitu:

- a. Dampak kebijakan pada masalah publik dan dampak pada aktor atau orang yang terlibat. Dengan memperhatikan dimensi ini, maka sasaran dalam kebijakan publik yang diharapkan dari kebijakan harus ditentukan dari awal proses pembuatan kebijakan publik.

³¹ Ibid. Hal. 272

- b. Dampak terhadap keadaan atau kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan yang telah diperkirakan oleh pembuat kebijakan.
- c. Dampak pada keadaan saat ini dan yang akan datang pada kelompok luar sasaran kebijakan.
- d. Unsur ekonomi, yaitu biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan publik sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana.
- e. Biaya yang tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik.³²

Evaluasi sematif atau dampak sebagaimana yang dijelaskan Palumbo sebelumnya adalah evaluasi yang berfokus pada dampak sebagai perubahan kondisi yang terjadi (baik yang terjadi secara fisik maupun sosial) sebagai akibat dari pelaksanaan kebijakan. Evaluasi dampak dilakukan untuk beberapa tujuan, di antaranya:

- a. Untuk menilai sejauh mana program (kebijakan) membawa dampak yang diinginkan terhadap individu, masyarakat dan lembaga.
- b. Untuk menilai dampak dan kaitannya dengan pelaksanaan program
- c. Untuk melihat dan mengeksplorasi adanya akibat yang tidak diperkirakan (baik positif maupun negatif).

³² Budi Winarno. Op.Cit. Hal. 232-235

- d. Untuk melihat bagaimana program mempengaruhi kelompok sasaran dan perbaikan kondisi kelompok sasaran serta faktor yang mempengaruhinya.

Adapun dimensi yang menjadi fokus dalam penilaian dampak adalah dampak pada masalah publik, dampak pada kelompok di luar sasaran, dampak sekarang dan yang akan datang, dampak biaya langsung untuk membiayai program dan dampak biaya tidak langsung yang dikeluarkan akibat suatu kebijakan.

Langbein sebagaimana dikutip oleh Sahya memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memperkirakan atau melakukan evaluasi dampak, antara lain:

- a. Waktu

Waktu menjadi hal penting untuk diperhitungkan karena kebijakan dapat melahirkan dampak yang panjang, semakin lama periode evaluasi waktu maka akan semakin sulit untuk melakukan evaluasi atau mengukur dampak

- b. perbedaan antara dampak aktual dan yang diharapkan

hal ini menjadi penting untuk diperhatikan dalam melakukan evaluasi untuk melihat dampak yang tidak diinginkan.

- c. Tingkat agregasi dampak

Dampak memiliki sifat agregatif, artinya dampak dapat dirasakan secara individual namun dapat meluas pada perubahan masyarakat secara menyeluruh.

d. Tipe dampak

Ada empat tipe utama dampak program menurut Langbein, yaitu:

- 1) Dampak pada kehidupan ekonomi : penghasilan, nilai tambah, dan sebagainya
- 2) Dampak terhadap proses pembuatan kebijakan.
- 3) Dampak terhadap sikap publik: baik berupa dukungan, atau penolakan
- 4) Dampak terhadap kualitas kehidupan individu, kelompok masyarakat yang bersifat non-ekonomis

e. Unit-unit sosial terdampak

Sebuah kebijakan dapat membawa dampak pada berbagai unit, antara lain:

- 1) Dampak individual : biologis (misalnya berupa penyakit), psikologis (stres, depresi), lingkungan hidup (tergusur, pindah rumah), ekonomis (tidak menentunya pendapatan, harga).
- 2) Dampak organisasional: langsung (terbantu atau terhambatnya tujuan organisasi), tidak langsung (peningkatan etos dan semangat kerja dan lain-lain).
- 3) Dampak pada masyarakat (meningkat atau menurunnya kesejahteraan).

- 4) Dampak pada lembaga dan sistem sosial (meningkatnya kesadaran kolektif masyarakat, menguatnya solidaritas sosial).

f. Faktor-faktor kegagalan kebijakan

Menurut Anderson ada beberapa hal yang membuat kebijakan gagal mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan, adapun faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sumber daya yang tidak memadai
- 2) Implementasi yang tidak tepat.
- 3) Masalah publik sering disebabkan oleh berbagai faktor, namun kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor.
- 4) Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan (misalnya ketakutan karena dianggap melanggar prosedur).
- 5) Tujuan kebijakan tidak sebanding atau saling bertentangan.
- 6) Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya.
- 7) Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan.
- 8) Timbulnya masalah baru sehingga membuat pengalihan perhatian dan tindakan.
- 9) Sifat dari masalah yang akan dipecahkan.³³

³³ Ibid. Hal. 281-283

2.4 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan wilayah khususnya perkotaan merupakan sebuah hal yang sangat kompleks mengingat perkembangan suatu wilayah berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan produksi sampah yang dihasilkan sebagai konsekuensi dari pola hidup manusia yang tidak lepas dari bahan sisa.

Sampah menjadi masalah sosial yang tidak dapat dihindari karena yang sering disepelekan yang pada akhirnya masalah ini menjadi sebuah bom waktu ketika sampah telah menumpuk dan menyebabkan masalah lainnya. Sampah kemudian menjadi masalah global karena sampah dapat menimbulkan gangguan kesehatan, mempercepat krisis iklim, masalah ekologi dan masalah sosial lainnya. Berdasarkan hal tersebut, pengelolaan sampah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, sampah sebagai masalah publik memerlukan satu instrumen (kebijakan) untuk melakukan pengelolaan sampah agar limbah masyarakat dapat diolah untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkannya.

Untuk melakukan pengelolaan sampah, pemerintah Kab. Polewali Mandar membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 4 tahun 2018 tentang Peraturan Pengelolaan Persampahan sebagai produk kebijakan publik untuk mengatur pengelolaan persampahan di Kab. Polewali Mandar dan sebagai turunan dari Undang-Undang No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Pada proses implementasinya, berdasarkan laporan kinerja daerah Kab. Polewali mandar khususnya pada bidang persampahan,

Kab. Polewali Mandar merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Barat yang memperoleh penganugerahan Adipura dari Presiden RI pada tahun 2019. Dalam melakukan pengelolaan sampah, salah satu instrumen penting adalah pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan dari sampah sebelum dikembalikan ke lingkungan. Namun setelah dua tahun mendapatkan penganugerahan Adipura dari Presiden, Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Binuang kemudian resmi ditutup karena menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan yang paling dirasakan dari pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Binuang ialah merembesnya air limbah dari TPA ke sawah masyarakat yang berpengaruh pada hasil panen dan menyebabkan gangguan kesehatan petani, polusi udara yang tercium hingga pemukiman penduduk. Polusi udara ini disebabkan oleh bau dari tumpukan sampah. Pencemaran lingkungan ini membuat masyarakat menolak dan menuntut penutupan TPA Binuang. Sementara itu respons pemerintah kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup Kab. Polewali Mandar ingin melakukan rehabilitasi terhadap TPA Binuang, sesuai dengan arahan Dirjen PSLB3 KLHK dan LHK RI yang melakukan kunjungan ke lokasi TPA. Hal ini kemudian yang membuat masyarakat semakin keras untuk melakukan penolakan karena merasa tidak dilibatkan dalam menyelesaikan masalah TPA. Kemudian ditutupnya TPA Binuang pada Desember 2021 membuat tidak jelasan pengelolaan sampah di Tempat

Pemrosesan Akhir membuat tumpukan sampah di beberapa wilayah kecamatan.

Penelitian ini berfokus pada kerusakan lingkungan yakni mengapa pengelolaan sampah di TPA Binuang menyebabkan merembesnya air limbah ke sawah masyarakat dan mempengaruhi penurunan kualitas kakao yang disebabkan oleh polusi udara sebagai dampak yang ditimbulkan kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Binuang Kab. Polewali Mandar serta melihat bagaimana tindak lanjut dari pengelolaan sampah di TPA pasca penutupannya secara lebih mendalam dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan untuk melihat semua dampak yang timbul dari kebijakan pengelolaan sampah serta menggunakan konsep ekologi politik untuk melihat bagaimana hubungan antara pencemaran lingkungan yang timbul dari pengelolaan sampah di TPA Binuang dengan kondisi ekonomi, sosial dan politik masyarakat, serta mengetahui bagaimana tindak lanjut pengelolaan sampah di Kab. Polewali Mandar pasca ditutupnya TPA Binuang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai dasar penelitian dengan memfokuskan proses pengambilan data menggunakan wawancara langsung kepada narasumber yang memahami masalah dalam penelitian ini. Metode ini diharapkan dapat dengan jelas mendeskripsikan data yang didapatkan menyangkut permasalahan penelitian ini.

Penulis menggambarkan bagan pemikiran penelitian ini sebagai berikut:

BAGAN KERANGKA PEMIKIRAN

